



► KASUS PENIPUAN

Marak Penipuan IKD, Pemkot Terbitkan SE

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja terus mengencakan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD). Sayangnya, upaya ini justru dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab untuk penipuan.

Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

Berdasar laporan, Pemkot Jogja mencatat ada tiga orang korban yang menderita kerugian akibat

► Ada tiga orang yang menjadi korban penipuan dengan kerugian masing-masing Rp1 juta, Rp17 juta, dan Rp7 juta.

► Pelaku menghubungi korban melalui *WhatsApp*, meminta korban mengaktifasi IKD.

penipuan berkedok aktivasi IKD. Untuk mengantisipasi berulangnya kasus, Pemkot mengeluarkan surat edaran (SE).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja, Septi Sri Rejeki, membenarkan

adanya tiga orang yang menjadi korban penipuan dengan kerugian materiil masing-masing Rp1 juta, Rp17 juta, dan Rp7 juta. Selain itu, ada puluhan orang yang telah dihubungi untuk dibidik menjadi korban penipuan hingga saat ini. "Orang yang menerima pesan *WhatsApp* cukup banyak, tetapi untuk korban sudah tidak ada, karena ada edaran itu, sekarang [modus penipuan] diabaikan," katanya, Rabu (9/7).

Dia menuturkan selama ini modus yang dilakukan pelaku yang mengatasnamakan Disdukcapil Kota Jogja menghubungi korban melalui telepon, *video call*, atau *WhatsApp* untuk meminta korban

mengaktifasi IKD. Kemudian, setelah korban mengangkat sambungan telepon atau *video call* tersebut, korban akan diarahkan untuk membuka laman tertentu. Dari situ, uang korban yang terhubung dengan *mobile banking* yang tercatat dengan nomor tersebut terkuras. Padahal, menurut Septi, jajarannya tidak pernah menghubungi warga secara personal melalui kanal tersebut.

Karena itu, Pemkot Jogja menerbitkan SE Sekda Kota Jogja No.100.3.4/2378 Tahun 2025 tentang Pencegahan Penipuan Aktivitas IKD, sekaligus mengimbau agar masyarakat untuk mengantisipasi modus penipuan tersebut. "Aktivasi IKD

tidak memerlukan verifikasi data melalui telepon atau *Whatsapp*," paparnya.

Septi menambahkan proses aktivasi IKD hanya dilakukan secara tatap muka di Disdukcapil Kota Jogja, Mal Pelayanan Publik (MPP) atau tempat pelayanan resmi lainnya. Dia pun meminta agar warga agar tidak membagikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), atau data pribadi lainnya melalui kanal telepon atau *WhatsApp*. "Imbauannya agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan siber dengan tidak memberikan data pribadi karena dapat berdampak penipuan," katanya.

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kependudukan dan Catatan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 11 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005